



Ekstraktivisme di Indonesia dalam Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger

Felix Riondi Sugar^{1*}, Serafim Wiltoni Abur², Marianus Agustinus Wukak³, Konradus Si Juhadun⁴, Anselmus K.A. Blikololong⁵, Antonius Sunarno Sam⁶, Salvinus Serafim⁷, Octavianus Priyadi⁸, Fransiskus Nino⁹, Lukas Tabora¹⁰

¹ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

² Prodi Filsafat Keilahian, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia

³⁻¹⁰ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: feliksugar@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze extractivist practices in Indonesia through the lens of Peter L. Berger's political ethics of development. The primary focus of this study is to examine how development based on the exploitation of natural resources not only causes ecological impacts but also gives rise to social injustice and a narrowing of the space for public participation. This study employs a qualitative research method using a literature review approach through the analysis of various literature, scientific journals, policy documents, and data related to extractivist practices in Indonesia. The results indicate that extractivist practices in Indonesia remain oriented toward an economic growth paradigm that ignores human costs, as criticized by Berger through the concepts of the "calculus of pain" and the "calculus of meaning." Mining activities and the exploitation of natural resources have been proven to cause environmental damage, socio-economic inequality, the marginalization of indigenous communities, and the loss of social and cultural values among local communities. Furthermore, extractive development also reveals a lack of community involvement in the decision-making process. Therefore, a development paradigm that is more humanistic, democratic, and ecological is needed so that development no longer makes humans and the environment the victims of economic growth.*

Keywords: *Development; Ecological Justice; Extractivism; Peter L. Berger; Political Ethics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ekstraktivisme di Indonesia melalui perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger. Fokus utama penelitian ini ialah melihat bagaimana pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga melahirkan ketidakadilan sosial dan penyempitan ruang partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan data terkait praktik ekstraktivisme di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ekstraktivisme di Indonesia masih berorientasi pada paradigma pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan biaya-biaya kemanusiaan sebagaimana dikritik oleh Berger melalui konsep *calculus of pain* dan *calculus of meaning*. Aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, marginalisasi masyarakat adat, serta hilangnya nilai sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, pembangunan ekstraktif juga memperlihatkan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan yang lebih humanis, demokratis, dan ekologis agar pembangunan tidak lagi menjadikan manusia dan lingkungan sebagai korban pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Ekstraktivisme; Etika Politik; Keadilan Ekologis; Pembangunan; Peter L. Berger.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap berbagai barang di era modern meningkat pesat dan sulit dikendalikan. Berbagai sektor pasar, politik, dan demokrasi, secara tidak langsung mendorong eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan potensi krisis. Akibatnya, sumber daya alam terus terkuras demi memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian pada titik tertentu, pemerintah di Indonesia justru menjalankan ekstraktivisme secara besar-besaran tanpa melibatkan masyarakat karena adanya pola pikir bahwa negara adalah pemegang keputusan utama atas sumber daya alam. Pemerintah merasa memiliki legitimasi penuh untuk menentukan arah

pembangunan, termasuk proyek ekstraktivisme seperti pertambangan dan deforestasi, sehingga suara penolakan dari masyarakat sering kali diabaikan. Selain itu minimnya keterlibatan publik juga disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang tidak transparan yang menyebabkan gerakan ekologis di ruang publik tersendat dan tidak berjalan secara maksimal.

Menimbang penegasan di atas, slogan “*Save Raja Ampat*” menguat di ruang publik. Kemarahan masyarakat meledak. Sehubungan dengan ini Aslami (2025) dalam *Lembaga Kajian Keilmuan Hukum Universitas Indonesia* (LK2 FH-UI) mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan hari-hari ini diakibatkan oleh aktivitas ekstraktivisme yang tinggi dan menjadi perhatian dan polemik dalam ruang publik. Dilaporkan bahwa, sejumlah perusahaan termasuk PT Gag Nikel, terlibat aktif dalam proyek tambang yang merusak pulau-pulau di Raja Ampat. PT Gag Nikel menyebabkan sedimentasi tinggi yang mengeruhkan perairan dan mengancam habitat 75 persen terumbu karang dunia. Sementara itu, PT. Mulia Raymond Perkasa (MRP) kedapatan melakukan 10 pengeboran tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Selain kerusakan ekosistem laut yang nyata di Raja Empat, fenomena serupa terjadi juga di Papua di mana operasi dari PT. Freeport Indonesia menimbulkan ketegangan antara dampak sosial dan ekologis yang signifikan. Walaupun proyek ekstraktivisme tersebut memberikan pemasukan besar bagi negara, operasinya justru menyebabkan kerusakan ekologi yang masif dan sulit dikendalikan. Masyarakat adat ternacam keberadaanya, dan mau tidak mau berpasrah dengan kemegahan proyek tersebut. Dilaporkan bahwa setiap hari, jutaan *ton tailing* dibuang ke Sungai Ajkwa yang mengalir melewati hutan-hutan dataran rendah Papua (Sulistya, 2025). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa semakin seriusnya ancaman ekstraktivisme terhadap kelestarian lingkungan, dan turut mengundang tanya dalam ruang publik.

Berkaca dari dua persoalan ekstrativisme di atas, masalah yang muncul justru lahir dari semakin sempitnya ruang publik untuk mendorong gerakan-gerakan ekologis. Ruang publik sulit menembus proses pengambilan keputusan pemerintah, sementara pemerintah justru menjadi penentu akhir berjalannya proyek tambang yang kerap merugikan masyarakat. Ini bukan tanpa alasan bahwa masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mendiskusikan pengijinan proyek ekstrativisme yang berjalan. Akibatnya, ruang publik terasa lemah dan tidak berdaya dalam mendorong kepedulian terhadap krisis ekologis yang semakin parah. Pemerintah sering menggunakan janji pembangunan sebagai alat untuk meredam kritik, meski realisasinya tidak sesuai harapan. Krisis ekologi juga diperburuk oleh sistem yang kaku, cara pandang yang keliru, ataupun paradigma dan kebijakan pembangunan yang tidak efektif sehingga pembahasan isu lingkungan di ruang publik sengaja diperlambat.

Terkait hal ini, Soni Keraf sebagaimana dikutip oleh Kumurur & Nangoy (2009) menjelaskan empat hal penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam menangani isu lingkungan, yaitu: *Pertama*, pemerintahan harus benar-benar efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. *Kedua*, pemerintah wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku. *Ketiga*, pemerintah harus berdiri sebagai wasit dan penjaga tegaknya hukum. *Keempat*, adanya perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara maksimal dan efektif. Artinya, paradigma pemerintahan yang benar ialah pemerintah harus menjalankan kekuasaan berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat secara terbuka tanpa meredam ruang publik. Karena itu, gerakan sosial-ekologis seperti Gerakan Masyarakat Sipil Raja Ampat, perlawanan masyarakat adat Poco Leok, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), serta berbagai koalisi masyarakat sipil perlu terus menyuarakan kepentingan publik guna memperkuat ruang dialog, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pemerintah dalam memahami pembangunan secara menyeluruh, sehingga berbagai kebijakan sering kali mengabaikan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Akibatnya, pembangunan tidak selalu menghadirkan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Bahkan, dalam banyak kasus, pembangunan menjadi sarana dominasi kepentingan politik dan ekonomi yang justru memicu ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan terkikisnya budaya lokal. Di sinilah letak paradoks pembangunan yang adalah di satu sisi diharapkan membawa kesejahteraan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk penolakan dan perlawanan (Dale, 2013).

Kritik terhadap paradoks pembangunan tersebut menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada pemikiran Peter L. Berger. Dalam karyanya *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*, ia mengkritik model pembangunan yang berkembang di negara-negara Dunia Ketiga karena sering dibangun di atas pengorbanan manusia. Berdasarkan pengamatannya, berbagai proyek pembangunan selalu mengandung biaya-biaya kemanusiaan yang harus ditanggung oleh sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah dan rentan (Berger, 1982). Karena itu, Berger menolak gagasan yang mengorbankan penderitaan nyata masyarakat saat ini demi janji kesejahteraan di masa depan. Baginya, tugas utama pembangunan bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan terlebih dahulu menjawab persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penderitaan sosial yang berlangsung pada masa sekarang.

Sejumlah penelitian telah mengkaji dampak ekstraktivisme di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Destaria Soe'oed (2024) menunjukkan bahwa praktik ekstraktivisme berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, terutama dalam kasus pertambangan Freeport di Papua. Keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam cenderung terkonsentrasi pada perusahaan multinasional dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal lebih banyak menanggung dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ayusia Sabhita Kusuma (2026) yang menunjukkan bahwa dominasi penguasaan lahan dan aktivitas ekstraktif telah memicu deforestasi secara masif serta memperparah berbagai bencana ekologis, seperti banjir dan longsor di Sumatera. Kondisi tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, komutatif, dan legal karena beban kerusakan lingkungan lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat rentan, sedangkan manfaat ekonominya dinikmati oleh segelintir elite. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 33 UUD 1945 pasca-amandemen cenderung memperkuat sentralisasi perizinan dan dominasi korporasi sehingga semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial yang substantif. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ananda Putri et al., (2025) menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan, rendahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan tingginya pelanggaran lingkungan serta lambatnya proses pemulihan ekosistem yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan sanksi yang lebih tegas, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan di sektor ekstraktif. Di sisi lain, kajian mengenai etika politik pembangunan Peter L. Berger yang dilakukan oleh Apolonaris Suan (2025) menunjukkan bahwa pembangunan modern masih menempatkan manusia sebagai pihak yang harus menanggung biaya pembangunan. Dengan kata lain, kesejahteraan yang dijanjikan sering kali diperoleh melalui pengorbanan kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, Suan menilai bahwa etika humanistik Peter L. Berger tetap relevan sebagai kerangka kritis untuk mengevaluasi praktik pembangunan yang mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, gagasan Berger dapat menjadi alternatif konseptual dalam merespons berbagai persoalan pembangunan yang lahir dari praktik ekstraktivisme di Indonesia.

Berdasarkan catatan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai ekstraktivisme di Indonesia umumnya lebih berfokus pada aspek hukum, ekonomi politik, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan misalnya penelitian dari Destaria Soe'oad (2024) menyoroti ketimpangan ekonomi akibat pertambangan Freeport di Papua, sedangkan Kusuma (2026) membahas persoalan keadilan sosial dan dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam, sedangkan penelitian dari Ananda Putri et al., (2025) lebih menekankan lemahnya penegakan hukum lingkungan di sektor ekstraktif. Sementara itu penelitian dari Apolonaris Suan (2025) mengkaji kritik Peter L. Berger terhadap pembangunan kapitalistik secara umum. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji praktik ekstraktivisme di Indonesia melalui perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger, terutama dengan menggunakan konsep *calculus of pain* dan *calculus of meaning* untuk membaca persoalan penderitaan manusia, hilangnya makna sosial-budaya, marginalisasi masyarakat adat, serta penyempitan ruang publik dalam pembangunan ekstraktif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena praktik ekstraktivisme di Indonesia semakin memperlihatkan dampak serius terhadap kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sementara kebijakan pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi semata. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger sebagai kerangka analisis untuk memahami ekstraktivisme tidak hanya dari sisi ekonomi dan ekologis, tetapi juga dari dimensi kemanusiaan, sosial-budaya, dan demokrasi dalam konteks pembangunan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai praktik ekstraktivisme di Indonesia dalam perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger (Semiawan, 2010). Selanjutnya data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen kebijakan, serta laporan yang berkaitan dengan isu ekstraktivisme, pembangunan, dan etika politik. Ada pula untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menafsirkan konsep-konsep utama dalam pemikiran Peter L. Berger, khususnya mengenai *calculus of pain* dan *calculus of meaning*, untuk membaca realitas pembangunan ekstraktif di Indonesia. Pada posisi yang sama juga analisis dilakukan secara

sistematis dengan menghubungkan teori Berger dengan berbagai fenomena ekstraktivisme seperti pertambangan, kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, serta marginalisasi masyarakat adat. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman kritis mengenai hubungan antara pembangunan, kekuasaan, dan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan oleh praktik ekstraktivisme di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger

Peter L. Berger lahir pada 17 Maret 1929 di Wina, Austria. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, ia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1946 dan kemudian mengembangkan karier akademiknya di negara tersebut (Berger, 1971). Melalui berbagai karya dan kontribusinya dalam bidang sosiologi, Berger dikenal sebagai salah satu sosiolog paling berpengaruh pada abad ke-20 (Berger, 1971). Berkat berbagai karya yang telah diterbitkannya, Berger kemudian dikenal sebagai seorang Sosiolog Amerika paling berpengaruh di abad ke-20 (Noor, 2011). Pada tahun 1949, Berger meraih gelar *Bachelor of Arts* (BA) dari Wagner College. Kemudian, Berger melanjutkan studinya di *New School for Social Research* di New York dan memperoleh gelar M.A pada 1950 dan Ph.D pada 1952. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Berger sempat bekerja di beberapa perguruan tinggi, antara lain; *Evangelische Akademie* di Bad Boll Jerman (1954-1955). Ia juga pernah menjabat sebagai profesor muda di *University North Carolina* (1956-1958), *New School for Social Research*, *University of Rutgers*, dan *Boston College*. Kemudian, sejak tahun 1981 ia menjadi profesor sosiologi dan teologi di *University of Boston* dan menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia (Nasu, 2023). Adapun karya-karya Berger yang sangat memengaruhi corak pemikiran sosial, politik, kebudayaan, dan agama antara lain; *Vitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (1963), *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966), *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (1967), *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural* (1970), *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics Social Change* (1974), *The Capitalist Revolution* (1986), *Homeless Mind: Modernization and Consciousness* (1974) (Nasu, 2023).

Satu hal yang pasti bahwa ketertarikan Peter L. Berger terhadap isu pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga berawal dari pengalaman langsungnya mengunjungi berbagai negara berkembang pada akhir 1960-an. Dalam perjalanannya ke kawasan Karibia, Venezuela, dan Meksiko pada tahun 1969, Berger berkesempatan bertemu dengan Ivan Illich, seorang pastor Katolik sekaligus pemikir kritis yang banyak mengulas persoalan pembangunan.

Melalui diskusi yang intens mengenai berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Meksiko, Berger mulai menaruh perhatian yang lebih serius terhadap realitas pembangunan di negara-negara berkembang. Ia bahkan mengakui bahwa perjumpaan dan dialognya dengan Ivan Illich menjadi titik penting yang mendorongnya untuk mendalami isu-isu pembangunan Dunia Ketiga secara lebih mendalam. Berger berkata; “*Sejak itu sampai sekarang, masalah-masalah pembangunan Dunia Ketiga beralih ke dalam pusat kegiatan keahlian saya...*” (Berger, 1982). Karena alasan itulah, ia kemudian banyak melakukan perjalanan ke negara-negara Dunia Ketiga, khususnya di benua Amerika dan Afrika.

Dalam merumuskan etika politik pembangunan, Peter L. Berger menawarkan dua instrumen analisis untuk menilai sejauh mana pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, yaitu *calculus of pain* (perhitungan penderitaan) dan *calculus of meaning* (perhitungan makna) (Nasu, 2023). Melalui kedua konsep tersebut, ia berupaya mengukur dampak pembangunan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi kemanusiaan dan sosial-budaya. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan kedua konsep tersebut sekaligus menjelaskan kritik Berger terhadap paradigma pembangunan yang berlandaskan kapitalisme maupun sosialisme.

Pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) merujuk kepada kebijaksanaan politik yang mesti mempertimbangkan berbagai penderitaan fisik yang dapat diakibatkan oleh pembangunan misalnya kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan kepada masyarakat akibat pembangunan (Berger, 1982). Di sini, ia sangat menekankan perihal kerugian-kerugian material dan fisik yang dapat dialami oleh manusia karena pembangunan. Oleh karena itu, Berger sangat menekankan agar setiap kebijakan politik mesti memperhitungkan segala bentuk penderitaan yang dapat dialami oleh manusia, sekaligus ia menolak segala bentuk pengorbanan manusia, khususnya masyarakat yang miskin dan lemah, demi mewujudkan cita-cita pembangunan. *Kedua*, perhitungan makna (*calculus of meaning*) merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki. Di sini, Berger menolak pembangunan karena efek dari pembangunan selalu berpotensi menggeser, menggantikan, atau bahkan menghilangkan kekayaan sosiokultural masyarakat yang sudah ada lebih dahulu.

Kedua “kalkulus” yang dirumuskan oleh Berger ini terlihat sangat ketat, terutama bagi kelompok-kelompok pemodal yang diinspirasi oleh paham kapitalisme dan sosialisme. Menurutnya, paham kapitalisme dan sosialisme yang masif berkembang di negara-negara Dunia Ketiga telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil. Kelompok-kelompok kapitalis datang dengan mitos pertumbuhan bagi semua warga negara, namun untuk

menciptakan pertumbuhan tersebut, dibutuhkan pengorbanan oleh beberapa kelompok. Kelompok kapitalis membangun kepercayaan bahwa dalam jangka pendek sebagian orang – terutama mereka yang miskin dan lemah – mesti berkorban dan akan menderita, namun dalam jangka panjang berkat pengorbanan dan penderitaan itu semua kelompok akan merasakan pertumbuhan ekonomi yang sama. Sedangkan, kelompok sosialis datang dengan mitos revolusi dengan membawa janji-janji emosional. Mitos revolusi membangkitkan harapan akan penyelamatan dari keadaan yang menyedihkan dan anomali sekarang ini, dan bayangan akan suatu masa depan yang akan melahirkan komunitas sejati yang ditandai oleh solidaritas (Berger, 1982).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi satu kesatuan, sekalipun pengertiannya berbeda (Ibrahim, 2017). Dalam *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial (1974)*, Berger mengakui bahwa pembangunan akan selalu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi disaat yang bersamaan Berger meragukan dan mempertanyakan pertumbuhan tersebut. Menurut Berger, tidak ada jaminan tentang mitos pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat umum di masa depan. Malahan Berger mendapati bahwa pertumbuhan tersebut hanya akan dinikmati oleh kelompok-kelompok pemodal dan penguasa saja. Sedangkan, keyakinan bahwa masyarakat kecil akan mendapat “tetesan-tetesan” dari meja para pemodal hanyalah ilusi yang dibangun demi kelancaran proyek pembangunan semata. Selain itu dalam penelitiannya, Berger menemukan fakta lain bahwa terdapat lebih banyak kelaparan dan penyakit sekarang ini dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, selain itu jumlah pengangguran dan setengah pengangguran telah meningkat (Berger, 1982). Dari fakta ini jelas bahwa proyek pembangunan yang dilatarbelakangi oleh ideologi apapun tidak mampu menyelesaikan persoalan praksis manusia – terutama bagi masyarakat yang kecil dan lemah – malah sebaliknya memperburuk keadaan yang sedang dialami. Oleh karena itu, menurut Berger masalah bagi negara Dunia Ketiga bukanlah bahwa mereka kekurangan sumber daya, kecapan teknologi, pranata-pranata moden, atau pun ciri-ciri kebudayaan yang dapat merangsang pembangunan, melainkan bahwa mereka sedang mengalami penghisapan oleh sistem kapitalis dan oleh agen-agen imperialis, baik asing maupun di dalam negeri (Berger, 1982).

Atas semua pertimbangan di atas, Berger mengusulkan pendekatan lain yang berguna bagi pembangunan, baik dari sudut teoritis maupun dari sudut politis. Pendekatan tersebut ialah pendekatan demitologisasi. Pendekatan demitologisasi akan menuntut agar semua fakta dihadapi dan semua biaya diperhitungkan (Berger, 1982). Artinya, fakta kemiskinan dan persoalan praksis masyarakat mesti diselesaikan terlebih dahulu dan solusi atas penyelesaian

hal-hal praksis tersebut mesti memperhatikan biaya-biaya manusiawi yang dapat diakibatkan oleh pembangunan. Pendekatan demitologisasi berlaku bagi segala jenis mitos yang melatarbelakangi suatu pembangunan, baik itu kapitalisme atau sosialisme. Menurut Berger, mitos pertumbuhan ataupun revolusi mesti dibongkar kepalsuannya. Sehingga, muncul cara pandang baru dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Oleh karena itu, Berger sebenarnya ingin mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah model pembangunan mana yang paling tepat, melainkan bagaimana pembangunan dapat dan harus menghilangkan penderitaan (Sutopo, 2013). Berger hendak mengusulkan bahwa pembangunan seharusnya menyertakan nilai-nilai etis, yakni biaya-biaya manusia (*human costs*), baik berupa fisik (*calculus of pain*) maupun makna (*calculus of meaning*).

Ekstraktivisme dan Ketidakadilan Sosial-Ekologis di Indonesia

Seperti telah disinggung sebelumnya, peningkatan kebutuhan manusia dalam ranah ekonomi telah memicu kerusakan lingkungan secara masif. Terkait dengan peningkatan kebutuhan tersebut, label “ekonomi” telah menjadi wadah yang mengubah berbagai aktivitas manusia di bumi. Berbagai sistem ekonomi turut membentuk cara pandang manusia terhadap alam. Lebih memprihatinkan lagi, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, serta keinginan yang sebenarnya masih dapat ditunda. Meningkatnya kebutuhan terhadap produk-produk industri, yang kemudian dirangkum dalam sistem ekonomi modern, membuat masyarakat terjebak dalam pola hidup konsumtif yang hedonis dan materialistis. Berdasarkan catatan ini, Rochmawan sebagaimana dikutip oleh Gunawijaya (2017), menjelaskan bahwa kebutuhan manusia sangat beragam. Justru karena keberagaman tersebut, kebutuhan dan keinginan menjadi semakin sulit dikendalikan. Artinya, ketika satu keinginan telah terpenuhi, kebutuhan lain akan terus muncul dan menuntut untuk dipenuhi.

Satu hal yang dapat dipahami secara pasti adalah bahwa kebutuhan manusia terhadap barang-barang industri menjadikan alam sebagai pihak yang paling terdampak. Kegiatan eksploitasi alam secara besar-besaran dianggap sebagai cara untuk semakin memenuhi kebutuhan manusia. Penting untuk direnungkan, “Mengapa alam sering menjadi sasaran?” Pada akhirnya, ketika pertanyaan ini dijawab, tampak bahwa manusia telah dikuasai oleh paham antroposentris yang begitu melekat. Paham antroposentrisme terus dipegang erat oleh jutaan orang, termasuk para penguasa yang duduk di kursi pemerintahan Indonesia. Pola pikir antroposentris sebenarnya telah muncul sejak lama dalam sejarah peradaban manusia dan sulit dihapuskan. Ia seolah-olah menjadi dasar yang dianggap paling ideal dalam menentukan sikap terhadap alam. Dapat dipahami dengan jelas bahwa literatur filosofis menerangkan bagaimana

paham antroposentris memberikan dampak buruk sejak masa René Descartes dengan slogannya, “*Aku berpikir maka aku ada.*” Dengan demikian, pemikiran manusia menjadi titik tolak dalam menguasai alam (Sugar dan Dominikus, 2025). Akibat dari paham ini adalah munculnya ekspansi ekstraktivisme. Demi memenuhi kebutuhan industri, satu-satunya langkah yang ditempuh adalah meningkatkan kegiatan ekstraktif, baik melalui pertambangan nikel, emas, dan baja, maupun melalui tindakan deforestasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun sangat penting untuk disadari bahwa, dari semua kebijakan ekstraktivisme yang dijalankan pemerintah, kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat adat. Sejalan dengan penjelasan Putri et al., (2025) bahwa masyarakat adat sebelumnya telah mengalami eksploitasi sistemik sejak masa kolonial, dan pola tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Eksploitasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari budaya, sosial, ekologi, ekonomi, hingga politik dengan tujuan melemahkan atau menghapus nilai-nilai budaya yang menjadi inti hubungan masyarakat adat dengan alam. Pada kenyataannya, nilai-nilai sosial dan budaya itulah yang menjadi dasar keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, pemerintah terlihat mengabaikan kelompok ini sebagai pihak yang paling terdampak. Pemerintah cenderung lepas tangan terhadap kebijakan yang telah dibuat sehingga menyebabkan masyarakat adat tersingkir dari posisi mereka.

Satu hal yang dapat dipahami bahwa Industri sumber daya alam merupakan sektor strategis dengan potensi keuntungan besar sehingga membutuhkan pengelolaan negara yang efektif dan berkelanjutan. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya ketidakpastian harga global, kondisi geologis, biaya input, serta risiko politik yang memengaruhi eksplorasi dan produksi. Selain itu, muncul masalah *asymmetric information*, karena investor terutama perusahaan multinasional sering memiliki informasi teknis dan komersial lebih lengkap dibanding pemerintah, sehingga memengaruhi kebijakan perpajakan dan pembagian keuntungan (Putri et al., 2025). Meskipun demikian, menurut hemat penulis bahwa penekanan pada efisiensi dan transparansi saja belum cukup untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada kepentingan publik, apalagi bagi masyarakat adat yang terdampak. Tantangan struktural seperti dominasi oligarki, lemahnya pengawasan negara, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal sering kali membuat kebijakan SDA tetap berorientasi pada kepentingan korporasi, bukan keberlanjutan ekologis maupun keadilan sosial. Karena itu, diperlukan reformasi tata kelola yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh persoalan distribusi kekuasaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang paling terdampak oleh aktivitas ekstraktif.

Satu hal yang pasti adalah bahwa ekstraktivisme saat ini telah memasuki fase baru dan menjadi topik perdebatan pembangunan yang mendapat kritik serius. Peningkatan eksploitasi alam dalam beberapa tahun terakhir juga telah memicu kemarahan masyarakat sipil. Menurut Gudynas, sebagaimana yang dikutip oleh Kusumoningtyas (2024) menegaskan bahwa, istilah ekstraktivisme pada awalnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan sektor pertambangan dan ekspor minyak di Amerika Selatan pada era 1970-an. Hampir seluruh pendukung maupun pengkritik jalur pembangunan sering menggunakan istilah ini. Seperti halnya Gudynas, Destaria Soe'oad (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ekstraktivisme sumber daya merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan eksploitasi terus-menerus terhadap sumber daya alam, seperti mineral, kayu, minyak, gas, maupun hasil bumi lainnya. Aktivitas ekstraktivisme selalu berfokus pada pengambilan sumber daya dalam volume besar untuk dijual, di mana keuntungan utamanya dinikmati oleh korporasi nasional bahkan negara tertentu. Masalah utama yang muncul adalah, selain distribusi keuntungan yang lebih berpihak kepada korporasi, masyarakat justru menanggung dampak sosial dan lingkungan yang sangat serius.

Sementara itu, Watts, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kusumoningtyas (2024), menyatakan bahwa studi terbaru yang diterbitkan oleh *Environment* melaporkan bahwa kegiatan eksploitasi saat ini telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 1970-an. Selanjutnya ekstraktivisme sumber daya pada era sekarang selalu menjadi jawaban atas konvergensi berbagai krisis seperti krisis iklim, lingkungan, energi, pangan, keuangan, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya adalah PT Freeport di Papua yang merupakan salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, berlokasi di kawasan Taman Nasional Lorentz. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak 1960-an sebagai usaha patungan Belanda-Amerika. Setelah sempat tidak beroperasi, Freeport kemudian menjadi contoh kasus dalam kajian liberalisasi pasar dan dampak desentralisasi ekonomi pada awal 2000-an. Freeport memperoleh kontrak karya legal selama 30 tahun dan saat ini tengah menegosiasikan kembali kontrak tersebut dengan pemerintah Indonesia (Soe'oad, 2024). Pada tahun 2018, melalui PT. Inalum, pemerintah Indonesia mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia, sehingga memperoleh kendali lebih besar atas tambang Grasberg. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam pengelolaan sumber daya mineral dan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kontrol negara atas aset strategis nasional.

Selain memberikan keuntungan, proyek ini juga mendapat sorotan dari masyarakat sipil karena ketimpangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus menjadi kritik untuk mengawasi tanggung jawab pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin merilis data

ketimpangan melalui Indeks Gini. Papua tercatat sebagai salah satu daerah dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, Indeks Gini Papua mencapai 0,392, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kaya sumber daya alam, distribusi pendapatan dan kesejahteraan di Papua masih sangat tidak merata. Ketimpangan tersebut dipicu oleh ketergantungan ekonomi pada sektor tambang besar seperti Freeport, rendahnya kualitas pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur terutama di wilayah pedalaman. Meski pemerintah dan perusahaan besar telah berkontribusi pada pembangunan, manfaatnya belum dirasakan secara merata dan sebagian besar pendapatan dari sektor tambang masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Menurut hemat penulis apa yang lebih adalah bahwa dampak ekstraktivisme sangat terlihat adanya krisis ekologis dan ketimpangan sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Ironisnya bahwa ruang publik, khususnya terkait pengambilan keputusan mengenai proyek pembangunan, masyarakat cenderung tidak dilibatkan. Pemerintah bahkan kerap mencoba meredam kritik dengan menarasikan proyek-proyek pembangunan nasional, sehingga menutupi aspirasi masyarakat, terutama dalam gerakan-gerakan ekologis. Proyek-proyek yang diklaim sebagai kepentingan nasional dijadikan alasan untuk membungkam perdebatan dan mengesampingkan aspirasi masyarakat, meskipun kenyataannya keuntungan dari eksploitasi sumber daya seringkali berpihak pada korporasi dan pemerintah pusat, sedangkan dampak negatif tetap menimpa masyarakat lokal. Strategi narasi ini menimbulkan paradoks meski pembangunan dikampanyekan sebagai untuk kepentingan rakyat, ruang publik yang seharusnya menjadi sarana kontrol sosial justru semakin sempit. Kondisi inilah yang memicu lahirnya gerakan-gerakan ekologis sebagai bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap penutupan ruang partisipasi publik dan ketidakadilan distribusi manfaat ekstraktivisme.

Sedarhananya bahwa kegiatan ekstraktivisme yang masif telah berdampak signifikan terhadap semakin tertutupnya ruang publik dan melemahnya kontrol masyarakat. Keputusan strategis mengenai proyek pembangunan sumber daya alam seringkali hanya berada di tangan pemerintah dan korporasi, sementara masyarakat, terutama komunitas lokal yang terdampak, jarang dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Kondisi ini membuat ruang publik kehilangan fungsi kritisnya sebagai arena partisipasi dan pengawasan, sehingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengontrol dan memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan. Akibatnya, ketimpangan sosial dan ekologis semakin memburuk, sementara suara masyarakat yang terdampak semakin tersisih dari proses pengambilan keputusan. Selain dampak yang ditimbulkan ekstraktivisme, perlu kita akui juga bahwa kegiatan ekstraktivisme juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi

nasional. Meski menghasilkan keuntungan besar, kontrol terhadap prosesnya seringkali tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara transparan.

Ekstraktivisme di Indonesia dalam Kacamata Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai praktik ekstraktivisme di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam masih didominasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi yang sering mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keberlanjutan ekologis. Dalam perspektif Berger (2011) ikut mempertajam bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari keberhasilannya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan penderitaan manusia serta hilangnya makna sosial yang ditimbulkannya. Atas dasar pertimbangan itu beberapa catatan temuan yang dianalisis antara lain:

Temuan pertama menunjukkan bahwa praktik ekstraktivisme di Indonesia menghasilkan apa yang oleh Berger disebut sebagai *calculus of pain* atau perhitungan penderitaan. Menurutnya bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhitungkan penderitaan fisik maupun material yang dialami masyarakat akibat pembangunan tersebut (Berger, 1982). Dalam konteks Indonesia, kondisi ini terlihat pada berbagai proyek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sekaligus ketimpangan sosial. Seperti misalnya catatan kasus pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan bagaimana pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam menciptakan dampak ekologis yang serius. Aktivitas pertambangan yang dilakukan sejumlah perusahaan telah menimbulkan sedimentasi dan mengancam keberadaan ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir (Aslami, 2025). Kerusakan lingkungan tersebut bukan hanya berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor perikanan dan pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal. Fenomena serupa juga terjadi di Papua melalui aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia. Pada posisi yang bersamaan ada juga penelitian dari Destaria Soe'oed (2024) menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada negara dan perusahaan, sementara masyarakat sekitar masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sering kali menghasilkan kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dikorbankan. Dengan demikian jika ditelusuri dari perspektif Berger, situasi tersebut memperlihatkan kegagalan pembangunan dalam menghitung biaya manusia (*human costs*)

yang ditimbulkannya (Berger, 1971). Penderitaan masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam, menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan meningkatnya ketimpangan sosial sering kali dianggap sebagai konsekuensi yang wajar demi mengejar pertumbuhan ekonomi nasional.

Temuan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa ekstraktivisme di Indonesia juga menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan *calculus of meaning* atau perhitungan makna. Berger menjelaskan bahwa pembangunan modern sering mengancam sistem nilai, budaya, dan identitas masyarakat yang telah hidup jauh sebelum proyek pembangunan hadir (Berger, 1971). Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya dapat menghasilkan kerugian material, tetapi juga kerugian kultural. Tidak bisa dipungkir juga bahwa dalam berbagai kasus pertambangan dan proyek ekstraktif di Indonesia, kelompok yang paling rentan mengalami kehilangan makna adalah masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari hubungan mereka dengan tanah, hutan, sungai, dan wilayah leluhur yang memiliki nilai sosial, budaya, bahkan spiritual. Ketika wilayah tersebut dialihkan menjadi kawasan pertambangan atau proyek industri, masyarakat adat tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan identitas kolektif yang selama ini membentuk keberadaan mereka (Putri et al., 2025). Selain itu catatan yang sama juga datang dari penelitian Ayusia Kusuma (2026) menunjukkan bahwa ekspansi ekstraktivisme telah mendorong deforestasi dalam skala besar dan memperbesar kerentanan masyarakat lokal terhadap berbagai bencana ekologis. Pada saat yang sama juga, manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemodal dan elite politik, sementara masyarakat lokal menanggung dampak negatifnya. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakadilan distributif yang sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan yang berkeadilan. Dari sudut pandang Berger (1971) melihat bahwa adanya hilangnya makna sosial dan budaya merupakan kerugian yang sama pentingnya dengan kerugian ekonomi. Karena itu, pembangunan yang menghancurkan identitas budaya masyarakat tidak dapat begitu saja dianggap berhasil hanya karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa ekstraktivisme di Indonesia berkaitan erat dengan penyempitan ruang publik dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai proyek ekstraktif umumnya dirancang dan diputuskan melalui mekanisme yang lebih banyak melibatkan pemerintah dan korporasi dibandingkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Akibatnya, ruang publik kehilangan fungsi kritisnya sebagai arena pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan kritik Soni Keraf sebagaimana yang ditegaskan dalam Kumurur & Nangoy (2009) yang

menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, berbagai gerakan ekologis sering mengalami kesulitan untuk memengaruhi kebijakan pembangunan karena keputusan strategis tetap berada di tangan pemerintah dan investor. Fenomena tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai gerakan masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), gerakan Save Raja Ampat, serta perlawanan masyarakat adat di Poco Leok, Manggarai-NTT. Gerakan-gerakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih berupaya mempertahankan ruang publik sebagai arena demokrasi untuk mengawasi kebijakan pembangunan yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal (Suan, 2025).

Temuan keempat menunjukkan bahwa kritik Berger terhadap mitos pembangunan masih sangat relevan untuk menjelaskan realitas pembangunan di Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu Berger (1971) menyebut bahwa pembangunan sering dibenarkan melalui mitos pertumbuhan ekonomi, yaitu keyakinan bahwa pengorbanan masyarakat saat ini akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar pada masa depan. Dalam praktiknya, narasi ini kerap digunakan untuk melegitimasi proyek-proyek ekstraktif yang menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang besar. Pemerintah sering menempatkan investasi, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan utama untuk mempercepat berbagai proyek pembangunan berbasis sumber daya alam. Namun, penelitian ini menemukan bahwa manfaat pembangunan tersebut tidak selalu dinikmati secara merata oleh masyarakat. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ekstraksi justru menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, serta marginalisasi sosial.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan tesis utama Peter L. Berger bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan harus terlebih dahulu mempertimbangkan penderitaan manusia (*calculus of pain*) dan hilangnya makna sosial-budaya (*calculus of meaning*) yang mungkin ditimbulkannya (Berger, 1982). Dalam konteks Indonesia, berbagai praktik ekstraktivisme menunjukkan bahwa pembangunan masih sering dijalankan dengan mengorbankan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan lingkungan hidup demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan yang lebih humanis, demokratis, dan ekologis agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik ekstraktivisme di Indonesia masih didominasi oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Dalam praktiknya, pembangunan tersebut sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan, keadilan sosial, serta keberlanjutan ekologis. Perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat hanya diukur dari peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan penderitaan manusia (*calculus of pain*) dan hilangnya makna sosial-budaya (*calculus of meaning*) yang ditimbulkannya. Selain itu juga penelitian ini menemukan bahwa praktik ekstraktivisme di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan sosial-ekologis seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, marginalisasi masyarakat adat, dan menyempitnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling terdampak, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh negara dan korporasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan masih dijalankan dengan logika pengorbanan manusia demi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan ekologis. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi menjadi sarana eksploitasi dan dominasi, melainkan menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aslami, N. (2025). Raja Ampat: Surga Terakhir Yang Terancam. *Lembaga Kajian Keilmuan Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI)*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/raja-ampat-surga-terakhir-yang-terancam/>, diakses pada 13 Juni 2025.
- Berger, P. L. (1971). *A Rumor of Angels: Modern Society and Rediscovery of The Supernatural*. Pelican Books.
- Berger, P. L. (1982). *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. LP3ES.
- Berger, P. L. (2011). *A rumor of angels: Modern society and the rediscovery of the supernatural*. Open Road Media.
- Dale, C. J. P. (2013). *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*. Sunspirit.
- Felix Riondi Sugar dan Dominikus. (2025). Antroposentrisme Dan Krisis Lingkungan Dalam

- Perspektif Ensiklik Laudato. *CARAKA*, 6, 1. <https://ojs.sttibc.ac.id/index.php/ibc>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan manusia dalam pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 131–150.
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(50), 6305–6328.
- Kumurur, V. A., & Nangoy, W. M. (2009). Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Krisis Ekologi Berkelanjutan. *Ekoton*, 9(1), 59–68.
- Kusuma, A. S. (2026). Keadilan Sosial Dan Pasal 33 Uud Pasca Amandemen: Analisis Aktivitas Ekstraktivisme Di Indonesia. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(2), 22–31.
- Kusumoningtyas, A. A. (2024). Relasi Kuasa Ekstraktivisme Pertambangan di Kalimantan Timur. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(3), 277–289.
- Nasu, K. B. (2023). *Kritik Peter L. Berger Terhadap Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme dan Konsekuensinya Bagi Pemahaman Yang Realistis Tentang Pembangunan*. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Noor, I. (2011). *Agama sebagai Universum Simbolik*. Pustaka Prisma.
- Putri, A. E., Handayani, I., Kurnia, S. Z., Hutasoit, G. M. K., & Sudrajat, A. A. (2025). Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak, Gas, dan Mineral di Indonesia. *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional*, 1(1), 1–21.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Soe'oed, D. V. (2024). Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam: Studi Kasus Freeport Dan Ketimpangan Ekonomi Di Papua. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(3), 263–276.
- Suan, A. O. (2025). Ironi Di Balik Pembangunan Kapitalisme (Menelisik Kritik Peter L. Berger Terhadap Ideologi Kapitalisme). In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 8(1), 20–35.
- Sulistya, A. R. (2025). 5 Kasus Kerusakan Lingkunagan Karena Aktivitas Pertambangan. *Tempo.Com*.
- Sutopo, O. R. (2013). Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(Sosiologi), 1–18.